



Lonjakan dramatis ancaman terhadap anggota parlemen Asia Tenggara pada tahun lalu, laporan temuan

Anggota parlemen di seluruh Asia Tenggara telah mendapat ancaman dan pelecehan yang meningkat secara drastis dalam satu tahun terakhir, sebagian karena kudeta militer di Myanmar, selain perkembangan yang meresahkan di tempat-tempat lain di kawasan, demikian temuan laporan baru oleh Anggota Parlemen ASEAN untuk Hak Asasi Manusia (APHR).

Jumlah Anggota Parlemen (MP) yang ditahan di Asia Tenggara telah meningkat secara dramatis tahun ini, dari hanya satu pada tahun 2020, menjadi 91 pada tahun 2021, disampaikan oleh APHR dalam laporan terbarunya berjudul *Parliamentarians at Risk: Reprisals against opposition MPs in Southeast Asia in 2021* (Anggota Parlemen Menghadapi Risiko: Pembalasan terhadap anggota parlemen oposisi di Asia Tenggara pada tahun 2021). Lonjakan mendadak ini sebagian besar disebabkan oleh perkembangan di Myanmar, di mana militer merebut kekuasaan melalui kudeta pada Februari, namun ada juga perkembangan yang mengkhawatirkan di tempat lain di kawasan ini, termasuk di Thailand, Filipina, dan Malaysia, kata APHR. Meskipun tidak ditampilkan secara rinci dalam laporan tersebut, mantan anggota parlemen oposisi telah juga dijadikan target di Kamboja.

"Tahun ini merupakan tahun kelam bagi hak asasi manusia di Asia Tenggara, dan ketika wilayah kami semakin tenggelam dalam cengkeraman otoritarianisme, anggota parlemen terpilih menjadi salah satu sasaran berat, terutama mereka yang membela dasar-dasar kemanusiaan, hak asasi manusia, dan demokrasi," kata Teddy Baguilat Jr, Anggota Dewan APHR dan mantan Anggota Parlemen (MP) Filipina. "Perkembangan di Myanmar sangat meresahkan, di mana oposisi politik diserang oleh junta, tetapi ada juga kekhawatiran di tempat lain, ketika pemerintah memanfaatkan COVID-19 untuk melemahkan anggota parlemen oposisi, dan mengikis peran pengawasan penting yang mereka mainkan dalam demokrasi."

"Selain pemenjaraan anggota parlemen yang semata-mata karena mereka memenuhi mandat sebagai wakil rakyat, kami juga menyaksikan ancaman terhadap anggota parlemen karena menjalankan pekerjaan mereka, serta berbagai kampanye yang diatur untuk membuat pelecehan dan disinformasi peradilan, dengan tujuan mendiskreditkan dan membungkam mereka," kata Baguilat.



Di tengah bencana hak asasi manusia yang sedang berlangsung di Myanmar, oposisi politik, khususnya anggota Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD), yang memenangkan pemilu 2020 dengan telak, telah menjadi salah satu target yang paling menonjol. Junta telah menangguhkan semua parlemen nasional dan daerah, dan melucuti kursi anggota parlemen yang dipilih secara demokratis tanpa ada pembenaran hukum ataupun konstitusional. Setidaknya 90 anggota parlemen tetap ditahanan atau menjadi tahanan rumah, sementara banyak lainnya bersembunyi untuk menghindari nasib yang sama.

“Tidak puas dengan mencuri hasil pemilu 2020 dari rakyat, junta militer di Myanmar telah berusaha membenarkan perebutan kekuasaannya dengan menutup parlemen, menyatakan kelompok yang dibentuk oleh anggota parlemen yang dipilih secara demokratis sebagai 'ilegal', dan memenjarakan hampir 100 orang, dari anggota parlemen itu dengan tuduhan sepenuhnya omong kosong,” kata Charles Santiago, Ketua APHR dan anggota parlemen Malaysia. “Selama setahun terakhir, rakyat Myanmar telah mengatakan dengan lantang dan jelas siapa perwakilan mereka - mereka yang terpilih lewat pemilihan 2020 - dan semua aktor internasional, termasuk ASEAN, harus mengutuk militer Myanmar dengan sekuat mungkin, menyerukan pembebasan bagi semua yang ditahan secara sewenang-wenang sejak kudeta, termasuk anggota parlemen, dan agar negara dikembalikan ke jalur demokrasi.”

Sementara situasi di Myanmar telah mendominasi tajuk utama, anggota parlemen di negara lain di Asia Tenggara juga menghadapi risiko, terutama di Malaysia, Filipina, dan Thailand, kata APHR.

Di Malaysia, pada bulan Januari pemerintah Perdana Menteri Muhyiddin Yassin menggunakan pandemi COVID-19 sebagai alasan untuk memberlakukan keadaan darurat, sementara parlemen ditangguhkan selama lebih dari tujuh bulan. Politisi oposisi termasuk di antara mereka yang ditargetkan dalam tindakan represi yang semakin meluas terhadap pendapat-pendapat yang berbeda, dengan akibat setidaknya sepuluh anggota parlemen diinterogasi atau didakwa menyatakan kritik tentang pelanggaran hak asasi manusia atau penangguhan parlemen.

Di Filipina, kampanye disinformasi, ancaman, dan apa yang disebut “penandaan merah” (*red-tagging*) anggota parlemen oposisi secara mengkhawatirkan meningkat menjelang pemilihan umum 2022, sementara Presiden Rodrigo Duterte dan pejabat senior lainnya



ASEAN PARLIAMENTARIANS FOR HUMAN RIGHTS

membuat tuduhan tak berdasar terhadap anggota parlemen sayap kiri, dengan mengklaim mereka mendukung pemberontakan komunis bersenjata. Senator Leila de Lima tetap di penjara, dan sekarang ditahan secara sewenang-wenang selama hampir lima tahun.

Sementara di Thailand, pemerintah dan koalisinya terus merancang kasus-kasus kriminal palsu terhadap anggota parlemen dari *Move Forward Party* (MFP), sedangkan anggota parlemen oposisi juga menjadi sasaran perundungan daring, seringkali melalui "operasi informasi" yang sangat terkoordinasi yang diatur oleh para aktor yang terafiliasi dengan negara.

"Serangan terhadap anggota parlemen adalah serangan terhadap demokrasi. Pelecehan sistematis terhadap anggota parlemen - baik daring, luring, yudisial atau lainnya - jelas ditujukan untuk mencegah mereka melakukan pekerjaan mereka dan bertindak sebagai penyeimbang (*check and balance*) atas nama rakyat," kata Baguilat Jr. "Peran anggota parlemen sangat penting dalam demokrasi, terutama selama pandemi dua tahun terakhir, atau menjelang pemilu, seperti yang terjadi di Filipina dan Kamboja."

"Di tengah serangan terhadap demokrasi yang kita saksikan di seluruh kawasan, mereka yang bekerja untuk melindunginya harus berhimpun dan bertindak dalam satu suara yang terpadu. Kami menyerukan kepada pemerintah-pemerintah kami di seluruh Asia Tenggara untuk melakukan segala daya mereka guna melindungi hak asasi semua anggota parlemen, dan mendesak sesama anggota parlemen untuk menyuarakan pelanggaran yang setiap kali mereka lihat," kata Baguilat.